

Peran Adminduk dan BPJS PBI bagi Masyarakat di Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat: Masalah dan Tantangan

Salwa Nur Dastiani¹, Filemon Manuel Sinyo², Sipa Ainil Mutiah³, Dita Safira Alya Syahrani⁴,
Septi Yani Rahmawati⁵, Jaka Warsihna⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Terbuka

¹042921996@ecampus.ut.ac.id,

Abstrak

Kata kunci:
*Administrasi
Kependudukan
; Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial-
Penerima
Bantuan
luaran; Dinas
Sosial; Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil; Sosialisasi*

Penelitian ini mengkaji bagaimana tantangan serta solusi mengenai Administrasi Kependudukan (Adminduk) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Masalah dan kendala yang terjadi di tingkatan desa seringkali tentang masalah terbatasnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya kurang memperhatikan pentingnya dua elemen tersebut. Selama penelitian, kami mendapatkan data masyarakat yang bermasalah dalam administrasi kependudukan serta masalah mengenai BPJS PBI dengan beberapa pendekatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Kami juga berkoordinasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil penelitian menunjukkan meskipun Administrasi Kependudukan berperan penting dalam registrasi dan pendataan, masih terdapat tantangan dalam aksesibilitas dan pemahaman masyarakat tentang program BPJS PBI. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan serta diperlukannya sosialisasi dan edukasi kolaborasi dengan pihak terkait dengan memastikan keikutsertaan masyarakat yang sulit terjangkau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan pemanfaatan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat.

A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan (Adminduk) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan dua elemen penting dalam sistem pelayanan publik di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adminduk merupakan hal yang sangat penting bagi setiap keluarga dan anggotanya yang merupakan serangkaian kegiatan meliputi pencatatan, pengelolaan, penerbitan, dan pendokumentasian data serta dokumen yang berkaitan dengan kependudukan. Adminduk bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum atas status pribadi dan kewarganegaraan seseorang, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Nikah/Cerai. Administrasi Kependudukan sangat penting karena dokumen-dokumen ini

diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Selain itu, data kependudukan yang akurat juga penting bagi pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Sedangkan BPJS PBI merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dibuat khusus untuk memfasilitasi akses kesehatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Layanan BPJS ini di peruntukan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian dan kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Para peserta PBI BPJS haruslah masyarakat yang tepat dan benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga tujuan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang layak kepada setiap penduduk Indonesia bisa diwujudkan dengan baik dan benar.

Di Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, peran Adminduk dan BPJS Kesehatan sangat signifikan dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan dan pengakuan identitas legal bagi warga desa. Namun, dalam implementasi dan pemanfaatan kedua layanan ini di tingkat lokal tidak selalu berjalan mulus. Masalah-masalah seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, serta kendala dalam pendaftaran dan pemanfaatan BPJS Kesehatan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait, turut memperburuk kondisi tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Adminduk dan BPJS Kesehatan bagi masyarakat di Desa Bojongloa, serta mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga manfaat dari kedua layanan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di desa ini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran Adminduk dan BPJS di Desa Bojongloa. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait dengan administrasi kependudukan dan layanan BPJS di masyarakat, serta untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan mulai dari 17 Februari hingga 17 Juni 2024.

Data yang diperoleh berasal dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa

Bojongloa melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD). Informan penelitian meliputi perangkat desa, pihak kecamatan, disdukcapil, dinas sosial dan masyarakat yang terlibat langsung dalam program Adminduk dan BPJS.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan desa, statistik kependudukan, dan literatur terkait Adminduk dan BPJS. Data ini akan digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Masalah dan Tantangan

Selama melakukan penelitian di Desa Bojongloa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan terutama bagi pemula seperti anak di usia pembuatan KTP. Masih terdapat warga yang lalai bahwa dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran merupakan dasar untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Terutama pada KTP dan KK yang dimana hal ini berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Desa Bojongloa ini seperti sering kali masyarakat mengeluh mengapa sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu salah satunya masyarakat enggan memperbaharui administrasi kependudukan yang mereka miliki. Herman Suwandi S.Ip,M.Si selaku Camat Buahdua mengatakan bahwa dengan memperbaharui data-data yang mereka miliki masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial akan terverifikasi oleh pemerintah pusat. Selain dari kesadaran masyarakat, pihak desa juga harus sangat memperhatikan pembaruan data-data masyarakatnya secara berkala.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan instansi terkait sering kali tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses informasi, jarak geografis, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang menganggap proses pengurusan dokumen Adminduk dianggap rumit dan memakan waktu yang lama, masyarakat harus mengunjungi kantor desa atau kecamatan untuk mengurus dokumen, yang terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Serta tak jarang juga masyarakat yang enggan datang langsung ke kantor desa ataupun kantor kecamatan bahkan hanya sekedar untuk memperbaharunya saja. Selain itu, kebiasaan yang mengakar pada masyarakat yang memiliki kendala dalam administrasinya akan gencar ketika sedang membutuhkan dan lalai ketika dirasa belum membutuhkannya. Serta terdapat persepsi masyarakat bahwa proses pengurusan dokumen memerlukan biaya yang tinggi, meskipun sebagian besar layanan ini sebenarnya gratis.

Selain Adminduk yang menjadi masalah di Desa Bojongloa, terdapat masalah dan tantangan yang cukup kompleks yaitu mengenai Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu

Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau istilah lainnya yaitu BPJS PBI. Meskipun BPJS PBI dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai BPJS PBI karena memang belum terdaftar sebagai penerima bantuan BPJS PBI atau yang tadinya sudah memiliki BPJS PBI tetapi berubah statusnya menjadi tidak aktif. Perubahan status pada BPJS PBI tersebut dikarenakan masyarakat kurang memerhatikan atau kurang dalam pemeliharannya. Menurut pihak dinas sosial Kabupaten Sumedang jika BPJS PBI tidak di gunakan dengan jangka waktu yang lama maka oleh pemerintah akan dianggap sudah tidak membutuhkannya lagi, hal itu akan dilakukan penindaklanjutan seperti menonaktifkan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota yang tersedia. Selain itu, biasanya BPJS PBI otomatis akan non-aktif jika salah satu anggota keluarganya terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, hal itu akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain dikarenakan di anggap sudah ada yang bisa membayar iuran setiap bulannya secara mandiri.

2. solusi

Perlu adanya pendekatan strategis yang melibatkan pihak desa dengan masyarakat guna memperkuat sinergi antara keduanya. Salah satunya dengan mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait, dan pihak BPJS untuk merumuskan solusi praktis dalam memudahkan akses Adminduk dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar BPJS PBI. Dalam pelaksanaannya, tim kami membantu pihak desa untuk mensosialisasikan bagaimana pemeliharaan Adminduk dan BPJS PBI baik itu secara formal dan secara informal. Adapun penyampaian secara formal tim kami melakukan pendekatan melalui penyuluhan di kantor desa sebelum pembagian bansos kepada masyarakat, selain itu kami juga berkolaborasi dengan Ibu Popy selaku koordinator PKH Kecamatan buahdua melalui sosialisasi perwakilan kelompok PKH Desa Bojongloa.



Gambar 1. Penyuluhan pemeliharaan Adminduk dan BPJS PBI



Gambar 2. Sosialisasi komponen PKH, BPJS, dan cara memanage keuangan Bersama koordinator PKH

Penyampaian secara informal juga kita laksanakan dengan beberapa pendekatan seperti door to door ke rumah masyarakat, mengadakan pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh masyarakat di abalai dusun yang didampingi ketua BPD dan jajarannya serta selipan ketika terdapat momen berbincang dengan masyarakat.



Gambar 3. Sosialisasi Doo to door ke rumah masyarakat sekaligus pendataan Admindak dan BPJS PBI



Gambar 4. Sosialisasi bersama para tokoh masyarakat didampingi oleh BPD

Setelah sosialisasi dan pengecekan data-data dilakukan, kami mendapatkan data masyarakat Bojongloa yang belum mempunyai Admindak secara lengkap dan masalah lainnya. Berikut merupakan data yang kami dapatkan selama pendataan:

Data Keseluruhan Yang Bermasalah Dalam Admindak Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua

No	Nama	Dusun	Keterangan
1	Siti Jubaedah	Bojongloa	Perbarui status dari cerai hidup ke cerai mati
2	Asep Heridar Sutarya	Bojongloa	Perbarui pekerjaan di ktp
3	Ade Udin Komar Sunarya	Bojongloa	KTP hilang
4	Eyet Siharyat	Bojongloa	KTP rusak
5	Karyadi Haryo	Bojongloa	KTP rusak
6	Kartono	Bojongloa	KTP rusak
7	Hidayat Arifin	Bojongloa	Ganti alamat KTP
8	Nani Suryani	Bojongloa	Ganti satatus KTP
9	Jujun Juasadi	Bojongloa	Pindahan baru
10	Mery Merdiani	Bojongloa	Ganti satatus KTP
11	Acep Nunu Samusi	Bojongloa	Ganti status KTP
12	Rizka Marlina	Bojongloa	Ganti alamat KTP
13	Kiswary Febian	Bojongloa	Ganti alamat KTP
14	Aa Supriadi	Bojongloa	KTP rusak
15	Aang Sudrajat	Bojongloa	KTP rusak
16	Tei Nurmalasari	Bojongloa	Pindahan dari Purwakarta
17	Wandi Achmad Kurniawan	Bojongloa	Pindah RT
18	Al Nurmayati	Bojongloa	Pindah RT
19	Yofik Setiawan	Bojongloa	Belum punya KTP (DISABILITAS)
20	Erna Silmi Azizah	Bojongloa	Membuat KK Baru dan ganti status KTP (pisah dengan sua
21	Sutiarah	Bojongloa	Ganti status KTP
22	Jajat Karmaharja	Bojongloa	Ganti alamat KTP
23	Rosmala Dewi	Bojongloa	Ganti alamat KTP
24	Ade Wiratna	Bojongloa	Perbarui KK dan ganti alamat KTP
25	Siti Khodijah	Bojongloa	Ganti status KTP
26	Bambang Seiawan	Bojongloa	KTP rusak
27	Yuvita Supriatiningsih	Bojongloa	KTP rusak
28	Warni	Bojongloa	Ganti status KTP
29	Yryo	Bojongloa	Ganti status KTP
30	Anda Sukanda Mahdiyana	Bojongloa	Ganti pekerjaan KTP
31	Ichil	Bojongloa	Belum punya KTP (DISABILITAS)
32	Ibrot Kurniasih	Bojongloa	Belum punya KTP (DISABILITAS)
33	Sati'ah	Bojongloa	Belum punya KTP (BERKEBUTUHAN KHUSUS)
34	Darmo Ibu Ade	Sumber	Perbarui KK (masih ada nama anaknya yang sudah menikah
35	Aantoa Ibu Ria	Sumber	Harus bikin surat nikah
36	Dadi Ibu Yuniar	Sumber	Surat Kawin (kawin rt)
37	Kusnadi	Sumber	KTP rusak
38	Wahyudin	Sumber	pindah domisili daari rt 22 ke 26 di KTP
39	Atot Rukmana	Sumber	KTP rusak
40	Wiwini Winaya	Sumber	KK KTP
41	Enjum	Sumber	Pembaruan KTP
42	Dedah (Mamast)	Sumber	Pembaruan alamat KK KTP dari 27 ke 25
43	Antia	Sumber	Pembaruan KK KTP
44	Muhidin Sarip	Sumber	Pembaruan KK KTP
45	Unah	Sumber	Pembaruan KK (KK lama)
46	Ratna Rasita	Sumber	Tanggal lahir di KK dengan data lain berbeda
47	Nana Robanda	Sumber	Ganti status di KK
48	Ade Sukmana Aprilian P B	Sumber	Bikin KTP pemulia
49	Encum	Citaman 1	Belum punya KK
50	Rahmat	Citaman 1	KTP hilang
51	Sawa	Citaman 1	Belum punya KK
52	Suti	Citaman 1	Belum punya KK
53	Yayat	Citaman 1	Belum punya KK
54	Lili	Citaman 1	Belum punya KK
55	Ruli Calta	Citaman 1	Ganti KK
56	Calta	Citaman 1	NIK di KK dan di KTP berbeda
57	Ajeng	Citaman 1	Bapak Ajeng meninggal, ganti kep.kel jadi Uyi
58	Yayat Supriatna	Citaman 1	NIK di KTP salah
59	Triah	Citaman 1	Belum punya KTP
60	Uju	Citaman 1	Ganti KK
61	Jaya	Citaman 2	Merubah KK
62	Sandy	Citaman 2	Belum punya KTP
63	Al Fitri	Citaman 2	Satu keluarga belum punya KTP

Gambar 5. Data yang bermasalah dalam Adminduk Desa Bojongloa

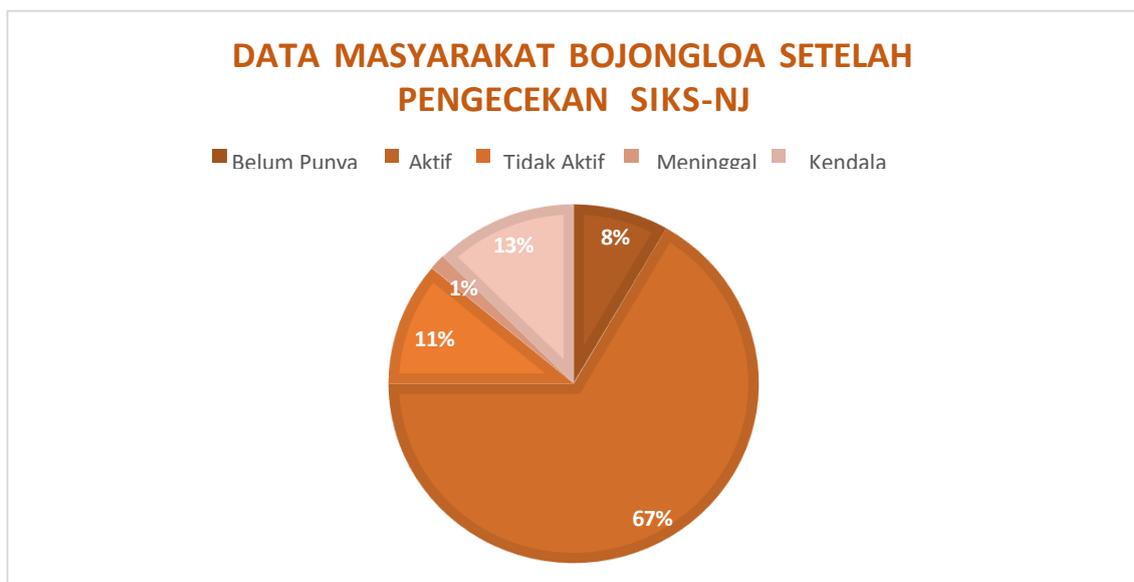
Data yang kami dapatkan dibantu oleh setiap kepala dusun Desa Bojongloa. Data ini kami rekap kemudian dijadikan sebagai acuan untuk berdiskusi dengan pihak desa dan kecamatan bagaimana penindaklanjutan dari masalah tersebut. Selanjutnya data tersebut kami gunakan sebagai bahan untuk pengajuan permohonan di datangkannya layanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu seperti lansia dan disabilitas, selain itu kami juga mengajukan data masyarakat lainnya yang masih memiliki masalah lainnya. Kami berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Sumedang bagaimana teknis dan pelaksanaannya.



Gambar 6. Koordinasi bersama pihak Disdukcapil Sumedang

Namun dengan adanya keterbatasan waktu, kami belum berhasil merealisasikan program tersebut secara langsung. Tindakan yang kami lakukan selanjutnya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak desa untuk menindak lanjuti program tersebut.

Selain itu, dari penelitian ini kami juga mendapatkan beberapa data masyarakat kurang mampu yang masih belum memiliki BPJS PBI dan status keaktifannya bermasalah. Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan kelalaian dalam pemeliharannya, yaitu salah satunya menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah BPJS PBI yang mereka miliki aktif atau tidak. Banyak data yang kami dapatkan dari wawancara kepada masyarakat, kebanyakan menyebutkan bahwa mereka belum punya BPJS-PBI ataupun tidak mengetahui apakah statusnya aktif ataupun tidak. Padahal setelah dilakukannya pengecekan BPJS-PBI melalui aplikasi SIKS-NJ (Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Penyelenggaraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial) ternyata kebanyakan statusnya aktif. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan mereka jarang menggunakan BPJS-PBI yang mereka miliki. Berikut merupakan data masyarakat yang kami dapatkan setelah dilakukannya pengecekan:



Gambar 7. Data BPJS PBI masyarakat kurang mampu Desa Bojongloa

Ibu Dewi Juwita SS., MM selaku penyuluh sosial ahli muda di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menyarankan bahwa idealnya untuk pemeliharaan BPJS PBI yaitu dengan penggunaan sekurang kurangnya 3 bulan sekali, jika bertahun tahun tidak di gunakan maka akan berpotensi terjadinya penonaktifan oleh pemerintah pusat. Beliau juga menyarankan bila mana belum merasa perlu menggunakannya, maka sesekali datanglah ke puskesmas minimal untuk di cek tekanan darah, dengan hal itu setidaknya nomor BPJS PBI yang dimiliki akan terdeteksi penggunaannya.



Gambar 8. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Data masyarakat yang belum terdaftar atau pun statusnya non aktif sebagai anggota BPJS PBI kami serahkan sepenuhnya kepada pihak desa untuk diajukan kembali ke pemerintah pusat. Hal itu dilakukan karena hanya pemerintah desa yang memiliki akses sepenuhnya untuk pengajuan pendaftaran melalui aplikasi SIPAJKDADI (Pelayanan Informasi Jaminan Kesehatan Daftar di Tempat). SIPAJKDADI merupakan Pelayanan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI JK APBD) yang diselenggarakan Dinas Sosial di Kabupaten Sumedang untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

D. Simpulan

Peran Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan isu-isu terkait Adminduk dan BPJS PBI sepenuhnya diserahkan kepada pihak desa, yang di bantu oleh kami peneliti sebagai fasilitator yang memastikan bagaimana keberlanjutan program tersebut. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk kecamatan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial, untuk mencari solusi atas masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat Desa Bojongloa dapat lebih sadar akan pentingnya Administrasi kependudukan dan Jaminan Kesehatan sehingga kesejahteraan masyarakat di Tingkat desa dapat meningkat.

E. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka atas pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang

diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPM) UT. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

F. Referensi

- Khadijah, Siti, (2024) BPJS PBI: Definisi, Aturan, Fasilitas, Kepesertaan dan Cara Cek Statusnya. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 <https://www.cermati.com/artikel/bpjs-pbi>
- Nurfajrina, Azkia (2024) Penyebab BPJS Kesehatan PBI Tidak Aktif dan Cara Mengaktifkannya Kembali. Diunduh di <https://finance.detik.com/moneter/d-7533905/penyebab-bpjs-kesehatan-pbi-tidak-aktif-dan-cara-mengaktifkannya-kembali> / tanggal 13 September 2024
- DinSos Kabupaten Sumedang, (2024) **Pelayanan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daftar di Tempat (SIPAJKDADI)**. Diakses pada tanggal 23 September 2024 <https://sipajkdadi.sumedangkab.go.id/>
- Suwandi S.Ip,M.Si, Herman (Camat Buahdua), wawancara oleh Filemon dkk. Kecamatan Buahdua. Pada tanggal 27 Maret 2024
- Juwita SS., MM, Dewi (Penyuluh sosial ahli muda DinSos Kab. Sumedang), wawancara oleh Filemon dan Salwa. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Pada tanggal 6 Mei 2024
- M.Moi, Maria (2024) Apa itu SIKS-NG dari Kemensos? Bagaimana Cara Menggunakannya?. Diakses pada 03 Oktober 2024 <https://flores.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2977817053/apa-itu-siks-ng-dari-kemensos-bagaimana-cara-menggunakannya-simak-informasi-lengkap-berikut-ini?page=all>